

REVIU RENSTRA

RENSTRA 2018-2023

DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN

**ULAWENG**

**KABUPATENBONE**

**KATAPENGANTAR**

BismillahirRahmanirRahimAssalamuAlaikumWr.Wb.

Ucapan syukur yang tak terhingga senantiasa kami haturkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikekuatan dan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusunanReviu Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Kantor Camat Tanete RiattangBarat Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undanganyangberlaku.

Reviu Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Kantor Camat Ulaweng disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari segala keterbatasan dan ketidakmampuan yang dimiliki sebagai manusia biasa dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini. Olehnya itu, kami mohon sumbang saran dan kritikan membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberi motivasi dalam penyelesaian Perubahan Rencana Strategis Kantor Camat Ulaweng Tahun2018-2023.

WassalamuAlaikumWr. Wb.

Tacipi , Januari 2022



i

1. DAFTARISI

Halaman

KATAPENGANTAR i

[DAFTARISI ii](#_bookmark0)

BAB.I PENDAHULUAN 1

LatarBelakang 1

LandasanHukum 2

MaksuddanTujuan 10

SistimatikaPenulisan 10

BAB.II GAMBARANPELAYANANPERANGKATDAERAH 13

Tugas FungsidanStruktur Organisasi 13

SumberDayaKecamatanUlaweng 23

KinerjaPelayananKecamatanUlaweng 29

TantangandanPeluangKec.Ulaweng 33

BAB III ISU–ISUSTRATEGISBERDASARKANTUPOKSI 34

IdentifikasiPermasalahan 34

TelaahanVisiMisidanProgram KepalaDaerah

DanWakil KepalaDaerahTerpilih 36

TelaahanRenstraK/LDanRenstraProvinsi 38

TelaahanRencanaTataRuang 40

PenentuanIsu-IsuStrategis 43

BAB.IV TUJUANDANSASARAN 47

TujuanJangkaMenengahKecamatan 47

SasaranJangkaMenengahKecamatan 47

BAB V STRATEGIDANARAHKEBIJAKAN 49

Strategi 49

ArahKebijakan 49

BABVIRENCANAPROGRAMDANKEGIATANSERTAPENDANAAN 52

BAB VIIKINERJAPENYELENGGARAANBIDANG URUSAN 71

BAB.VIIIPENUTUP 72

ii

LampiranPeraturanBupatiBoneNomor41Tahun2021Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17tahun2019TentangPerubahanRencanaStrategisPerangkat DaerahKabupaten BoneTahun2018-2023

***1.***

# BAB I

# PENDAHULUAN

* 1. **LatarBelakang**

BerdasarkanUndang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perubahan Renstra Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkanPembangunan Nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat denganBangsa lain yang maju.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, seluruh Perangkat Daerahtermasuk Kecamatan diwajibkan untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam penyusunan RencanaKerja (Renja) yang disusun setiap tahun yang berisi tujuan, sasaran,strategi,kebijakan,program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ulaweng yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2021 –2023 dan bersifat indikatif.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adapun Perubahan pada Rencana Strategis baik dilingkup Perangkat Daerah maupun Kecamatan mengacu pada:

1. Perubahan RPJMD KabupatenBone
2. Terbitnya Berbagai Regulasi Baru
3. MeresponCovid-19

Perubahan Renstra Kecamatan Ulaweng mengacu pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2021–2023 dengan memperhatikan dokumen perencanaan teknis lain.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada baganalir keterkaitan berikut ini:

Tabel 1.1

Keterkaitan Perubahan Renstra Kecamatan dengan DokumenPerencanaan Lainnya



**RPJM**

**Daerah**

dijabarkan

**RKP** pedoman

**Daerah**

**KUA-PPAS**

Landasan

**RAPBD**

Bahan

**PERDAAPBD**

Bahan

Bahan

acu

an

pedoman

Bahan

pedoman

pedoman

pedoman

Pedoman,pengendalian& evaluasi

Pedoman,pengendalian& evaluasi

**RenstraPERANGKATDAERAH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **RenjaPERANGKATDAERAH** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **RKAPERANGKATDAERAH** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **DPAPERANGKATDAERAH** |  |

Perubahan Renstra Kecamatan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2021-2023 dan disusun secara simultan. Perubahan Renstra Kecamatanmenjadi acuan untuk penyusunan Renja Kecamatan yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan Peraturan Bupati.

Renja Kecamatan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun secara simultan dengan RKPD. RKPD menjadi pedoman dan acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menetapkan KUAPPAS Bersama DPRD Kabupaten. KUA PPAS menjadi acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Rancangan APBD setiaptahun.

# LandasanHukum

DasarHukumyangmenjadilandasandalamPenyusunanPerubahan Renstra Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone2021-2023adalah sebagaiberikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-DaerahTingkatII Di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2007Nomor68,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusiDaerah(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2009Nomor130,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolanLingkunganHidup(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5059);
11. Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor46 Tahun 2016tentang

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5941);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor206,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2018Nomor2,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6178);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraTahun 2019 Nomor 52 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 6323);

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan /atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2015 Nomor 199);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cata Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PencapaianTujuanPembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2017 Nomor 136);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor10);
7. Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020

Tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun

2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (Lembar NegaraTahun 2020 Nomor 259);

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangnan Jangka Menengah Daerah, serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 1955);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1570);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun2009 Nomor9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2015

Nomor 7);

1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2016 Nomor 1 );
2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2021 Nomor 1);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2013);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten BoneTahun 2016 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten BoneTahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten BoneTahun 2016 Nomor 9);

1. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018

– 2023

# Maksuddan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Ulaweng adalah menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 – 2023 terutama yang terkait dengan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Kecamatan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Ulaweng adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ulaweng yang ditetapkan setiap tahun.
2. Sebagai penuntun dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 3 tahun ke depan.
3. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA/DPA)Kecamatan khususnya yang terkait dengan indikator kinerja.

# Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis KecamatanUlaweng Kabupaten Bone Tahun 2021 -2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan,** Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis, Dasar Hukum Penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, Maksuddan Tujuan sistematika penulisan,serta sistematika penulisan.

**BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah,** Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum aspek geografi dan demografi,aspek kesejahteraan mayarakat,aspek pelayanan umum dan daya saing.

**BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah,** Bab ini memuat penjelasan tentang isu strategis sebagai dampak dari kinerja pengelolaan kepemerintahan dalam lima tahun lalu yang dipakai acuan dalam menyusun visi,misi,tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran lima tahun kedepan.

**BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,** Bab Ini menguraikan visi danmisi kepala daerah, serta tujuan dansasaran pembangunan setiap misiyang akan dicapai selama limatahun ke depan yang dirumuskan bersama para pemangku kepentingan.

**BAB V Strategi dan Arah Kebijakan,** Bab ini memuat Strategi dan arah kebijakan selama lima tahun kedepan.

**BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan,** Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kinerja dan Kerangka Pendanaan Indikatif**,**dalam bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah Kecamatan dengan SKPD terkait beserta program dan disajikan pula pencapaian target indikato rkinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan dan menguraikan pendanaan Kecamatan yang indikatif

**BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,**Pada bagian inidikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga

Tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMDP dan Indikator Kinerja utama sebagai pengukur kemampuan penyelenggaraan pemerintah daerah.

**Bab VIII Penutup,** memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan perencanaan kecamatan selama tigatahun kedepan.

# BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

# Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ulaweng

Peraturan Bupati Nomor 94 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi sertaTata Kerja Kecamatan.

# Tugas

* + - 1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untu kmenangani sebagian urusan otonami Daerah
      2. MenyelenggarakanTugas umum pemerintahan yang meliputi:
         * Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
         * Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
         * Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
         * Mengkoodinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana,fasilitas pelayanan umum
         * Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kecamatan
         * Membina dan Mengaasi penyelenggaraan pemerintahandesa
         * Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjad iruang lingkup tugas nyaatau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
         * Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

# TugasPokok

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuaidengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih

rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit.Rinciantugas - tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peranturan Daerah Nomor

8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten BoneTahun 2016 Nomor 8.

Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) Kecamatan merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi diantara lain sebagai berikut :

# CAMAT

* 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
  2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peratuan daerah dan peraturan bupati;
  5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan;
  7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
  8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada dikecamatan dan;
  9. Pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

# SEKERTARISCAMAT

* 1. Penyusunan program dan anggaran pada kecamatan;
  2. Pelaksanaan program dan anggaran;
  3. Pengoordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seksi lain dan/atau kelurahan;
  4. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
  5. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
  6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
  7. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  8. Pelaksanaan pembinaan ASN dilingkungan kecamatan; dan
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat yang dalam pelaksanaanya dipimpin oleh Sekretaris camat membawahi beberapa sub bidang yaitu:

* + 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

# SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

* 1. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat,naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
  2. Menyusun rencana formasi,informasi jabatan serta data kepegawaian;
  3. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai,kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
  4. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
  5. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia(SDM) aparatur sipil negara (ASN) melalui program Pendidikan dan pelatihan;
  6. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, Gedung kantor, perlengkapan kantor dan asset lainnya;
  7. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana /perlengkapan /aset;
  8. Melaksanaka npembinaan ASN pada sub bagian umum dan kepegawaian; dan
  9. Melaksanakan tugaslain yang diberikanoleh sekretaris kecamatan terkait tugasnya.

# SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

* 1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerjadan keuangan;
  2. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran dilingkungan kecamatan;
  3. Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan dilingkungan Kecamatan;
  4. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggung jawaban dan laporan kinerja;
  5. Menyiapkan rencana umum pengadaan;
  6. Membuat rencana kerja tahunan;
  7. Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, Menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  8. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan kecamatan;
  9. Mengatur dan menjalankan adminsitrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
  10. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
  11. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yangberlaku;
  12. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
  13. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
  14. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  15. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan;
  16. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
  17. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan;dan
  18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.

# SEKSI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN

* 1. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
  2. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  3. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuanbangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan Lembaga kemasyarakatan lainnya;
  4. Memfasilisitasi penyelesaian sengketa antardesa/kelurahan;
  5. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  6. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
  7. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
  8. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
  9. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
  10. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
  11. Memfasilitasi Kerjasama antar desa dan Kerjasama desa dengan pihak ketiga;
  12. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
  13. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan dan kependudukan;
  14. Melaksanakan pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pemeritahan dan kependudukan;dan
  15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

# SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

* 1. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
  2. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
  3. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
  4. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  5. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  6. Pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

# SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

* 1. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian,peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan;
  2. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
  3. Mengoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya;
  4. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
  5. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  6. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
  7. Melaksanakan pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat terkait tugasnya.

# SEKSI PEREKONOMIAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

* 1. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
  2. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
  3. Memfasilitasi penyelengaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
  4. Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
  5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
  6. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
  7. Mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
  8. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayahnya
  9. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga kemasyarakatan;
  10. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  11. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
  12. Melaksanakan pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
  13. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

# SEKSIPELAYANANUMUM

* 1. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
  2. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
  3. Menfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
  4. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
  5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayananu mum;
  6. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pelayanan umum;dan
  7. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

# Fungsi

* Pembinaan,pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan,keamanan dan ketertiban umum
* Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan
* Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanahan
* Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang social dan kesejaktraan masyarakat
* Pengawasan, pembantuan dan pelaksanaan monitoring bidang pertanahan.

# Strukturorganisasi

Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Ulaweng KabupatenBone, berdasarkan Perbub Bone No.94 Tahun 2016 adalah sebagai berikut terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum
8. Seksi Pengelola PAD dan Ekonomi Kesejahteraan Rakyat
9. Seksi Pelayanan Umum
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Ulaweng



**SEKSIPELAYANANUMUM**

**SEKSI PEMBANGUNAN DANPEMBERDAYAAN MASYARAKATDANDESA**

**SEKSIPEREKONOMIAN,PADDANKESEJAHTERAANRAKYAT**

**SEKSIKETENTRAMANDANKETERTIBANUMUM**

**SEKSIPEMERINTAHANDANKEPENDUDUKAN**

**SEKRETARIS**

**KELOMPOK**

……………….

**CAMAT**

**SUB BAGIAN PROGRAM DANKEUANGAN**

**SUB BAGIAN UMUM DANKEPEGAWAIAN**

**KELURAHAN/DESA**

PerubahanRencanaStrategis(Renstra)Kec. Ulaweng,2018–2023 26

# Sumber Daya Kecamatan Ulaweng

* + 1. **SumberDayaAparatur**

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Ulaweng mempunyai 9 orang ASN dan 8 Non ASN dengan rincian sebagai berikut:

Tabel2.1KomposisiASNTAHUN2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **SUMBERDAYAMANUSIA** | **TAHUN** |
| **2020** |
| **1** | JumlahASN | 12 |
| **2** | JumlahNon-ASN | 3 |
|  | Total | 15 |
| **3** |  | |
|  | - Laki-Laki | 9 |
|  | -Perempuan | 3 |
| **4** |  | |
|  | -Eselon II | - |
|  | -Eselon III | 2 |
|  | -Eselon IV | 6 |
| **5** |  | |
|  | - Golongan I | - |
|  | - Golongan II | 2 |
|  | - Golongan III | 8 |
|  | - Golongan IV | 2 |
| **6** |  | |
|  | -Tamat SD | - |
|  | -Tamat SMP | - |
|  | -Tamat SMA | 3 |
|  | -DiplomaI/II/II | - |
|  | - S1 | 6 |
|  | - S2 | 3 |
|  | - S3 | - |

***Sumber: Data Kepegawaian Tahun 2021***

Berdasarkan komposisi pegawai yang telah diuraikan pada table diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa factor penentu yang menjadi bagian integral dari kualitas maupun kuantitas pegawai diKecamatan Ulaweng. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: Komposisi Pegawai ASN berdasarkan Jabatan (Eselonisasi), berdasarkan Pangkat / Golongan, berdasarkan Tingkat Pendidikan serta berdasarkan Diklat Formalyang telah diikuti. Komposisi pegawai ASN berdasarkan beberapa faktor tersebut diatas dapat dibuat dalam bentuk table sebagai berikut ini:

Tabel2.2

Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Jabatan (Eselon) Tahun 2016 -2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
| L | | P | | L | | P | | L | | P | | L | | P | | L | | P | |
| Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | Eselon II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Eselon III | 2 | 4,1 | - | - | 2 | 4,5 | - | - | 2 | 5,1 | - | - | 1 | 3,9 | 1 | - | 1 | 3,9 | 1 | - |
| 3 | Eselon IV | 17 | 34,7 | 14 | 28,6 | 15 | 34 | 12 | 27,3 | 4 | 28,2 | 2 | 30,8 | 4 | 35,3 | 2 | 27,5 | 4 | 35,3 | 2 | 27,5 |
| 4 | Staff | 3 | 10,2 | 11 | 22,4 | 4 | 9,1 | 11 | 25 | 4 | 7,7 | - | 28,2 | 4 | 7,8 | - | 21,6 | 4 | 7,8 | - | 21,6 |

***Sumber : Subag Kepegawaian Kec.Ulaweng 2021***

Tabel 2.3

Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Golongan Tahun 2016 - 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| No | Uraian | L | | P | | L | | P | | L | | P | | L | | P | | L | | P | |
| Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | Gol.I | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2 | Gol.II | 1 | 2,1 | 5 | 10,4 | 0 | - | 5 | 11,6 | 0 | - | 5 | 13,2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 3 | Gol.III | 21 | 43,8 | 19 | 40 | 19 | 44,2 | 17 | 39,6 | 14 | 36,8 | 17 | 44,7 | 12 | 34,3 | 16 | 45,7 | 12 | 34,3 | 16 | 45,7 |
| 4 | Gol.IV | 2 | 4,2 | 0 | - | 2 | 4,6 | 0 | - | 2 | 5,3 | 0 | - | 1 | 2,9 | 0 | - | 1 | 2,9 | 0 | - |

***Sumber: Subag Kepegawaian Kec.Ulaweng 2021***

Tabel2.4

Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Pendidikan tahun 2016 - 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
| L | | P | | L | | P | | L | | P | | L | | P | | L | | P | |
| Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | SD | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2 | SMP | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 3 | SMA | 2 | 4,1 | 9 | 18,4 | 1 | 2,3 | 9 | 20,5 | 1 | 2,6 | 9 | 23,1 | 1 | 2,8 | 9 | 25 | 1 | 2,8 | 9 | 25 |
| 4 | Diploma | 0 | - | 1 | 2 | 0 | - | 1 | 2,3 | 0 | - | 1 | 2,6 | 0 | - | 1 | 2,8 | 0 | - | 1 | 2,8 |
| 5 | S1 | 18 | 35,8 | 12 | 24,5 | 16 | 36,3 | 10 | 22,7 | 11 | 28,2 | 10 | 25,7 | 10 | 27,8 | 9 | 25 | 6 | 27,8 | 2 | 25 |
| 4 | S2 | 4 | 8,2 | 1 | 2,1 | 4 | 1 | - | 2,3 | 1 | 10,3 | - | 2,6 | 1 | 8,3 | 1 | 2,8 | 1 | 8,3 | 1 | 2,8 |

***Sumber: Subag Kepegawaian Kec.Ulaweng 2021***

# Sarana dan Prasarana

Tabel2.5

Sarana dan Prasarana Kecamatan UlawengTahun 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | SARANA DAN PRASARANA | TAHUN  **2020** |
| 1 | Mobi lDinas | 1Unit |
| 2 | Mobil Layanan | 1Unit |
| 3 | Motor Dinas | 5 unit |
| 4 | Papan pengumuman | 1 Buah |
| 5 | Kursi Futura | 20 Buah |
| 6 | Ruangan | 7 Ruang |
| 7 | Meja Kerja | 10 Buah |
| 8 | Kursi Plastik | 100 Buah |
| 9 | KursiTamu | 3 Set |
| 10 | Lemari Arsip | 6 Buah |
| 11 | Jam Dinding | 2 Buah |
| 12 | Telepon | * Unit |
| 13 | Televisi | 2 Unit |
| 14 | Brangkas Kecil | * Buah |
| 15 | Filling Kabinet | - Buah |
| 16 | Komputer | 2 Unit |
| 17 | Papan Struktur | 1 Buah |
| 18 | Papan Peta | 1 Buah |
| 19 | Kipas Angin | 2 Buah |
| 20 | Meja kecil | 2 Buah |
| 21 | Printer | 3 Unit |
| 22 | Tiang Bendera | 2 Buah |
| 23 | Papan Nama Kantor | 1 Buah |
| 24 | PapanPengumuman | 1 Buah |
| 25 | Note book | - Unit |
| 26 | Peta GeografisKecamatan | 1 Buah |
| 27 | SoundSistem | 1 Buah |
| 28 | Proyektor | 1 Buah |
| 29 | Laptot | 5 Buah |
| 30 | Kulkas | 1 Buah |
| 31 | Kursi Kerja | 3 Buah |
| 32 | AC | 4 Buah |

***Sumber: Pemegang Barang Kec. Ulaweng 2021***

# Kinerja Pelayanan Kecamatan Ulaweng

Kinerja Pelayanan diKecamatan Ulaweng dilihat dari beberapa Indikator kinerja:

* Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
* Meningkatkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban
* Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.
* Meningkatkan penataan ruang wilayah kecamatan.

Tabel 2.9

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ulaweng tahun2016-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Indikator Kinerja sesuai Tugasdan Fungsi Perangkat Daerah** | **TargetNSPK** | **TargetIKK** | **Target IndikatorLainnya** | **Target Renstra Perangkat DaerahTahun ke-** | | | | | **Realisasi CapaianTahun ke-** | | | | | **Rasio Capaian padaTahun ke-** | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai StandarPelayanan |  |  |  | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan |  |  |  | 68 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68 | 70 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Persentase Usulan Kegiatan pembangunanoleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan /Desa dapat dilaksanakan ditingkatKelurahan/Desa |  |  |  | 28 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 28 | 30 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | PersentaseGanguan Keamanan Ketentramandan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan |  |  |  | 88 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Persentase Penurunan Pelanggaranterhadap Perda |  |  |  | 78 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tabel2.10

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan UlawengTahun 2016-2020.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **TARGET ANGGARAN** | | | | | **REALISASI ANGGARAN** | | | | | **CAPAIAN** | | | | | **RATA-RATA**  **PERTUMBUHAN** | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **TARGET** | **REALISASI** |
|  | **Pendapatan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -DAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -PAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -…………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tota lBelanja** | 16,914,392,900 | 16,044,260,700 | 16,975,965,945 | 20,554,631,995 | 20,141,752,551 | 16,520,071,725 | 15,866,071,299 | 16,019,496,976 | 19,650,291,869 | 19,163,843,913 |  | **99** | **93** | **94** | **96** | 5,68 | 3,76 |
|  | -Belanja Pegawai | 15,445,482,900 | 14,561,660,700 | 14,965,500,945 | 16,093,568,995 | 15,460,018,814 | 15,053,687,185 | 14,384,246,299 | 14,009,706,976 | 15,475,856,575 | 14,683,208,928 |  | 99 | 93 | 94 | 96 | 1 | 5 |
|  | - Belanja  Barang &Jasa | 1,445,910,000 | 1,478,400,000 | 2,010,465,000 | 3,294,353,000 | 4,555,333,737 | 1,443,384,540 | 1,477,625,000 | 2,009,790,000 | 3,082,661,294 | 4,354,234,985 |  | 99 | 99 | 96 | 99 | 27 | 1,011 |
|  | - BelanjaModal | 23,000,000 | 4,200,000 | 0 | 1,166,710,000 | 126,400,000 | 23,000,000 | 4,200,000 | 0 | 1,091,774,000 | 126,400,000 |  | 100 | 100 | 0 | 100 | 90 | 61 |

***Sumber:Bendahara Pengeluara nKec.Ulaweng, 2021***

# Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ulaweng

* + 1. **Tantangan**
       - Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
       - Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
       - Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemebrdayaan masyarakat
       - Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
       - Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami yang mengalami penurunan kualitas
       - Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang peraturan-peraturan
       - Tingkat partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan disegala dimensi.

# Peluang

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

* + - * Dukungan Stackholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi.
      * Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SD Mmelalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan Latihan bagi setiap pegawai.
      * Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
      * Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
      * Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yangdilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang.

# BAB III

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

# Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ulaweng

* + - Permasalahan pada Sekretariat

1. Kerjasama antar Seksi dikecamatan dalam melaksanakan kegiatan masih belum optimal;
2. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan kurang representatif;
3. Belum maksimalnya integrasi data dan system informasi antar OPD;
4. Kurangnya pemah aman aparatur dalam mengelola administrasi kepegawaian;
5. Belum/tidak semua OPD telah memiliki domain / situs tersendiri;
   * + Permasalahan pada Seksi Tata Pemerintahan dan kependudukan
6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;
7. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanakan program pemerintah.
8. Belum optimalnya system layanan informasi dan pengaduan;
9. Masih lemahnya koordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan antar kecamatan dengan OPD teknis;
10. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanakan program pemerintah.
    * + Permasalahan pada Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyakatdan Desa
11. Belum adanya sinkronisasi Perangkat Daerah dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak.
12. Belum optimalnya penyusunan program kegiatan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa.
13. Masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam Forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kecamatan.

1. Kurangnya pengkoordinasian kegiatan dan tingkat perkembangan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah maupun Swasta.
2. Masih lemahnya pengetahuan dan informasi tentang pengembangan pembangunan pedesaan
   * + Permasalahan pada Seksi Perekonomian PAD dan Kesra
3. Belum tersedianya Database kondisi saluran drainase, jalan lingkungan dan bangunan dikecamatan;
4. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTLH;
5. Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga danm emeliharas arana dan prasarana;
8. Data penerima rastra belum akurat;
9. Belum adanya sinkronisasi OPD dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti KotaLayak Anak;
10. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan;
    * + Permasalahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum
11. Keterbatasan Personil (Satpol PP)
12. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi terkait;
13. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan
14. Kurangnya Pembekalan/Bintek
15. Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangaan bencana ditingkat Kecamatan dan Desa;
16. Belum sinkronnya program yang diadakan Pemerintah Kecamatan dan Desa;
    * + Permasalahan pada Seksi PelayananUmum
17. Masih rendahnya kualitas SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum dikecamatan.
18. Masih kurangnya koordinasi instansi yang terkait dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
19. Penggunaan sarana dan prasarana pelayanan umum ditingkat kecamatan belum optimal.
20. Ruang Pelayanan Umum yang kurang representative tidak satupintu

# Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

* + 1. **Visi**

# “Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

**Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepenggangan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan dengan daerah–daerah lain yang saling menguntungkan.

**Masyarakat Bone yang Berdaya Saing,** dapat diarahkan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi,komparatif,dan kompeititif yang berbasis sumber daya local dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional,nasional,bahkan internasional.

**Masyarakat Bone yang Sejahtera,** mengandung makna semakin meningkatny akualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, social budaya,lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dank ondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

# Misi

* + - 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme (KKN).
      2. Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
      3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan,dan social dasar lainnya.
      4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasisdesadankawasan perdesaan.
      5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.
      6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

# a. Keterkaitan Misi dan Pokok Visi

Tabel 3.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **MISIRPJMD** | **POKOKVISI** |
| 1. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang  baik,bersihdan bebasKKN. | Mandiri |
| 2. | Mengembangkan kemandirian ekonomi dan  Meningkatkan taraf hidup masyarakat | Mandiri/  Sejahtera |
| 3. | Meningkatkan akses,pemerataan,dankualitas  Pelayanan kesehatan, pendidikan, dan social dasar lainnya. | Sejahtera |
| 4. | Mengoptimalkan akselerasi pembangunan  Daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan. | Mandiri |
| 5 | Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk Pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan  publik. | BerdayaSaing |
| 6. | Meningkatkan budaya politik, penegakan  hukum,dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat. | Sejahtera |

# Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi /Kota

Berdasarkan Peraturan Menter iDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.Pelaksanaan rencana pembangunan daerah dinyatakan bahwa telaahan RenstraK/Ldan Renstra Perangkat Daerah DitujukanUntuk Menilai Keserasian, Keterpaduan, Sinkronisasi,dan Sigernitas pencapaian sasaran Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten /Kota Terhadap sasaran Renstra K/L Dan Renstra perangkat Daerah Provinsi Berdasarkan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Sesuai DenganFungsi maising-masing PerangkatDaerah.

Renstra K/L Yang sesuai denga urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi perangkat Daerah Kecamatan AdalahRenstra Kementrian Dalam Negeri Republik Indinesia. Dari beberapa sasaran yang ditetapkan strategis yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 ,4(empat) diantaranya memiliki keterkaitan yang secara langsung menjadi faktor pendorong pencapaian kinerja pelayananPerangkatDaerahdi Kecamatan Yangantaralain:

1. Meningkatnyakualitaspelayananpublikdalampenyelenggaraanpembangunandaerah
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan,efektif,efisien,akuntabel,dankompetitif.
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

Fakto rpenghambat pelayanan diantaranya adalah:

* 1. Lemahnyapelaksanaankoordinasidenganinstansiteknislainnya
  2. Belum tertib dan lemahnya system administrasi organisasi
  3. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
  4. Masih kurangnya Koordinasi Dinas /Instansi terkait dengan pemerintah kecamatan.

# Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang rencanaTata Ruang Wilayah Kabupaten Bone disebutkan bahwa RencanaTata Ruang Wilayah kabupaten Bone Berperan Sebagai alat untuk mewujudkan seimbangan pembangunan antarwilayah dan kesinambungan pemanfaatanruang diKabupaten Bone.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Berfungsi Sebagai Pedoman Untuk:

1. Penyusunan rencana pembangunan daerah;
2. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang diwilayahKabupaten Bone;
3. perwujudanketerpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar wilayah serta keserasian antara sektor diKabupaten Bone;
4. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Bone
5. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Bone dengan Kawasan Sekitarnya.

# Integrasi IndikatorTPB dalam Dokumen RPJMD dan RPJPD

Berdasarkan hasil perumusan scenario pencapaian indikatorT PB,maka direkomendasikan indikator TPM dan targetnya yangakan diintegrasikan kedalam dokumen RPJMDP Kabupaten Bone2021 –2023.

# Rekomendasi KeberlanjutanLainnya untuk Pengembangan Wilayah di Kabupaten Bone

Berdasarkan pertimbangan 6 muatan KLHS, hasil konsultasi publik isu pengembangan berkelanjutan dan pencapaian indikator TPM, maka dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone. Adapun rekomendasi tersebut diuraikan dibawah ini:

1. Rekomendasi Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur
   1. Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur, khususnya yang terkait penyediaan pelayanan dasar seperti saranadan prasarana belajar, fasilitas kesehatan, sanitasi layak, ai rbersih, pengelolaan persampahan.
   2. Dalam penyediaan dan pengembangan infrastruktur diarahkan berdasarkan kluster proyeksi tekanan populasi pendudu. Secara umum dibagi dalam 4 kluster pengembangan:Kluster Salomekko,kluster Libureng,

KlusterTaneteRiattang,dan Kliuster Ajangale.

* 1. Pengembangan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapiresiko bencana dan perubahan iklim.

1. Rekomendasi Pemanfaatan Sumber daya Alam yang Lebih Berkelanjutan
   1. PemanfaatanSumber Daya Lahan diKabupaten Bone diarahkan pada 3 fungsi utamayakni:Lahan untuk pengembangan kegiatan perkotaan, Lahan pengembangan produksi pertanian dan perkebunan dan Lahan untuk peruntukan konservasi dan perlindungan.
   2. Pemanfaatan lahan menyesuaikan dengan daya dukungdan daya tamping lingkungannya. Wilayah dengan fungsijasa ekosistem yang tinggi harus dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
   3. Pemanfaatan lahan yang lebih berkelanjutan dengan konse pagroforesty.
   4. Senantiasa mempertimbangkan kepekaan ekologis, budayayang terkait warisan, kerentanan terhadap perubahan iklim dan resiko bencana dalam pemanfaatan ruang wilayah.
2. Rekomendasi untuk mewujudkanTataKelola yang baik
   1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah dan stakeholder terkait khususnya dalam pencapaian indikator TPB.
   2. Perbaikan manajemen data sebagai dasar monitoring danevaluasi serta pengambilan kebijakan.
   3. Pemberian reward dan punishment untuk mendorong perbaikan yang berkelanjutan
   4. Peningkatan pelayanan secara bertahap
   5. Mendorong pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, diklat dan pengembangan inovasi daerah
   6. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat secara umum
   7. Pengembangan kolaboras imul tipihak untuk mencapai target TPB/SDGs
   8. Penegakan kebijakan publik untuk perencanaan tata ruang,pelibatan sosial dan pengelolaan lingkungan; dan peluangi nvestasi lingkungan.

# PenentuanIsu–Isu Strategis

Meliha tgambaran permasalahan pembangunan ditingkat kecamatan,danmemperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi KecamatanUlaweng adalahsebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi,SDM aparatur yang tersedia diKecamatan Ulaweng sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta p roduktivitas aparatur.
3. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
4. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/ stakeholders yang masih rendah.
5. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
6. Suistainable Development Goals (SDG's) atauTujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan 17 tujuan dengan169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi,Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga Tahun2030 yang ditandatangani olehpemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium dimarkas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir2015.
7. Pandemi ccovid19. Pandemi COVID-19 diIndonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah corona virus 2 (SARS-CoV-2). Virus itu dipastikan menyebar ke Indonesia pada 2 Maret 2020, dan pada tanggal 9 April, pandemi telah menyebarke 34 provinsi di Indonesia.Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat adalah provinsi yang terkena dampak terparah.Hingga 14 November di

Indonesia telah dilaporkan terjadi 463.007 kasus, tertinggi di Asia Tenggara, di atas Filipina. Dalam hal jumlah kematian,Indonesia menempati urutan ketiga di Asia dan ke-15 didunia. Meskipun demikian jumlah kematian mungkin jauhlebih tinggi daripada yang dilaporkan karena mereka yang meninggal dengan gejala COVID-19 aku tetapi belum dikonfirmasi atau diuji tidak dihitung dalam angka kematian resmi.Pandemi corona virus (Covid-19) menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian Indonesia,yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi,peningkatan pengangguran,dan peningkatan kemiskinan.Sejak COVID-

19 menyebar keIndonesia, hampir seluruh sekto rmenerima dampak negatifnya,tidak hanya sosial,kesehatan dan pendidikan,tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini.Pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartalII 2020 minus5,32 persen.Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turunj auh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Terhambatnya aktivitas

Perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian,sehingga banyak pekerja yang dirumah kan atau bahkand iberhentikan (PHK) .Apabila resesi terus berlanjut,diperkirakan akan berdampak secara riil pada masyarakatdalam hal penurunan pengeluaran konsumsi masyarakat,sehingga mendorong potensi penambahan penduduk rentan miskin danmiskin.

# BAB IV

**TUJUAN DAN SASARAN**

# Tujuan Jangkah Menengah Kecamatan Ulaweng

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan Misi,ditetapkan sebagaiberikut:

“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kec.Ulaweng”

# Sasaran Jangkah Menengah Kecamatan Ulaweng

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,spesifik,mudah dicapai,rasional,untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas ,sasaran yang akan dicapai dari masing-masing tujuan tersebut antara lain

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik“

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kec.Ulaweng,2018–2023

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Kecamatan Ulaweng

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **TUJUAN/SASARAN** | | **INDIKATOR TUJUAN/SASARAN** | **Kondisi**  **AwalTahun2020** | **TARGET KINERJATUJUAN/**  **SASARAN PADATAHUN** | | |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| 1. | **Tujuan** | **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ulaweng** | Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP | CC | BB | BB | A |
| Sasaran | Meningkatnya kualitas pelayanan public | Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan  sesuai standar pelayanan(%) | 90 | 92 | 100 | 100 |

# BABV

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

# Strategi

Kecamatan Ulaweng sebagai Satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsidan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis.Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiriatas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakaan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruhdan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan.Adapun strategi yang telah ditetapkan yaitu:

“Optimalisasikan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen Perangkat Daerah”

* 1. **Arah Kebijakan**

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan,selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arahkebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah / perangka tdaerah sebagai penjabaran strategis, arah kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahunkedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkuppelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan dan penggunaansumber daya yang adapadaperangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Ulaweng, maka ditetapkan1(satu) arah kebijakan yaitu:

“Mengembangkan system opersional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum”.

Strategi dan Arah Kebijakan dapa tditunjukkan melalui tabel berikut:

Tabel 5.1

Tujuan,Sasaran,Strategidan Arah Kebijakan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VISII: **MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHNTERA** | | | |
| MISII: *Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik,bersih dan bebas KKN*. | | | |
| **TUJUAN** | **SASARAN** | **STRATEGI** | **ARAHKEBIJAKAN** |
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ulaweng | Meningkatny akualitas pelayanan publik | Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah | Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum. |

# BAB VI

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

# Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi .Sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maka program-program yang direncanakan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

# PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

* + - 1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
         * Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah
         * Koordinasi danPenyusunan Dokumen RKA-SKPD
         * Koordinasi dan Peanyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
         * Koordinasidan Penyusunan Laporan Capaian Kinerj a dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
         * Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

# Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

* + - * + Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

# AdministrasiUmumPerangkatDaerah

* + - * + Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        + Penyediaan BahanL ogistik Kantor
        + Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
        + Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
        + Penyelenggaraan Rapa tKoordinasi dan Konsultasi SKPD

# Administrasi KeuanganPerangkatDaerah

* + - * + Penyedian Gaji danTunjangan ASN

# Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

* + - * + Pengadaan Mebel
        + PengadaanPeralatan dan Mesin Lainnya

# Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

* + - * + Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya Air danListrik
        + Penyediaan jasaPelayanan Umum

# Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

* + - * + Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
        + Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

# PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

* + - 1. **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan**
         * Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan InstansiVertikal

# PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DANKELURAHAN

* + - 1. **KoordinasiKegiatanPemberdayaanDesa**
         * Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

# Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

* + - * + Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
        + Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan

# PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

* + - 1. **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
         * Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonseia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Perkiraan Pendanaan Kecamatan Ulaweng untuk 3 (Tiga) Tahun kedepan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

**Tabel6.1**

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan UlawengTahun2021–2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **KODE** | **PROGRAMPRIORITAS** | **INDIKATORKINERJA(OUTCOME)** | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **2024** | | **UNIT KERJAPENANGGUNGJAWAB** | **LOKASI** |
| **TARGET** | **RP** | **TARGET** | **RP** | **TARGET** | **RP** | **TARGET** | **RP** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  | **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan** Ulaweng | **Meningkatnyakualitas pelayanan publik** |  | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cakupan Realisasi Penunjang Urusan PemerintahanDaerah(%)** | **100%** | **17,650,025,299** | **100%** | **19,966,550,024** | **100%** | **21,963205,026** | **100%** | **24,159,525,529** |  |  |
|  |  | **Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluas iKinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Pelaporan Capaian Kinerja yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban Perangkat Daerah** | **100%** | **48,836,750** | **100%** | **53,720,425** | **100%** | **59,092,468** | **100%** | **65,001,714** |  |  |
| 1 |  | PenyusunanDokumen PerencanaanPerangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (dokumen) | 2 | 36,080,000 | 2 | 39,688,000 | 2 | 43,656,800 | 2 | 48,022,480 | Sub Bagian Program dan Keuangan | Kec.Ulaweng |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **KODE** | **PROGRAMPRIORITAS** | **INDIKATORKINERJA(OUTCOME)** | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **2024** | | **UNIT KERJAPENANGGUNGJAWAB** | **LOKASI** |
| **TARGET** | **RP** | **TARGET** | **RP** | **TARGET** | **RP** | **TARGET** | **RP** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 2 |  |  |  | KoordinasidanPenyusunanDokumenRKA-SKPD | Jumlah DokumenPerencanaan danPenganggaranProgramdanKegiatanPerangkat Daerahyang tersusun(dokumen) | 2 | 2,800,000 | 2 | 3,080,000 | 2 | 3,388,000 | 2 | 3,726,800 | Sub BagianProgram danKeuangan | Kec.Ulaweng |
| 3 |  | KoordinasidanPeanyusunanDokumenPerubahanRKA-SKPD | Jumlah Koordinasidan PenyusunanDokumenPerubahan RKA-SKPD(dokumen) | 2 | 2,861,000 | 2 | 3,147,100 | 2 | 3,461,810 | 2 | 3,807,991 | Sub BagianProgram danKeuangan | Kec.Ulaweng |
| 4 |  | KoordinasidanPenyusunanLaporanCapaianKinerjadanIkhtisarRealisasiKinerjaSKPD | Jumlah LaporanCapaian KinerjadanIkhtisarRealisasi KinerjaSKPDyangtersusun(dokumen) | 3 | 3,500,000 | 3 | 3,629,500 | 3 | 3,992,450 | 3 | 4,391,695 | Sub BagianProgram danKeuangan | Kec.Ulaweng |
| 5 |  | EvaluasiKinerjaPerangkatDaerah | Jumlah DokumenEvaluasi KinerjaPerangkat Daerahyang tersusun(dokumen) | 4 | 3,595,750 | 4 | 5,393,625 | 4 | 5,932,988 | 4 | 6,526,286 | Sub BagianProgram danKeuangan | Kec.Ulaweng |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **KODE** | **PROGRAMPRIORITAS** | **INDIKATORKINERJA(OUTCOME)** | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **2024** | | **UNIT KERJAPENANGGUNGJAWAB** | **LOKASI** |
| **TARGET** | **RP** | **TARGET** | **RP** | **TARGET** | **RP** | **TARGET** | **RP** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  |  | **AdministrasiKepegawaianPerangkatDaerah** | **PersentasePelaksanaanAdministrasiKepegawaian** | **100%** | **7,260,000** | **100%** | **20,400,000** | **100%** | **22,440,000** | **100%** | **24,684,000** |  | **Kec.Ulaweng** |
| 6 |  | PengadaanPakaian Dinasbeserta AtributKelengkapannya | JumlahPengadaanPakaian KhususHari-hari tertentu(stell) | 40 | 7,260,000 | 40 | 12,000,000 | 40 | 13,200,000 | 40 | 14,520,000 | SeksiPelayananUmum | Kec.Ulaweng |
| 7 |  |  |  | PendataandanPengolahanAdministrasikepegawaian | Jumlah pendataandan PengelolahanAdministrasiKepegawaian(Laporan) | 12 | 7,560,000 | 12 | 8,400,000 | 12 | 9,240,000 | 12 | 10,164,000 | SeksiPelayaanUmum | Kec.Ulaweng |
|  |  |  |  | **AdministrasiUmumPerangkatDaerah** | **PersentasePelaksanaanAdminintrasiUmum** | **100%** | **741,924,500** | **100%** | 816,116,950 | **100%** | **947,363,394** | **100%** | **1,070,520,635** |  | **Kec.Ulaweng** |
| 8 |  | PenyediaanPeralatan danPerlengkapanKantor | Jumlah LaporanPenyediaanPeralatan danPerlengkapanPenunjangAdministrasiPerkantoransesuai rencanakebutuhan | 12 | 55,194,500 | 12 | 82,843,390 | 12 | 91,127,729 | 12 | 100,240,502 | Sub BagianUmumdanKepegawaian | Kec.Ulaweng |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  |  | PenyediaanBahanLogistikKantor | Jumlah LaporanPenyediaanMakanan danMinuman bagiPegawaidanTamu sesuairencanakebutuhan | 12 | 380,930,000 | 12 | 419,023,000 | 12 | 460,925,300 | 12 | 507,017,830 | Sub BagianUmumdanKepegawaian | Kec.Ulaweng |
| **NO.** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **KODE** | **PROGRAMPRIORITAS** | **INDIKATORKINERJA(OUTCOME)** | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **2024** | | **UNIT KERJAPENANGGUNGJAWAB** | **LOKASI** |
| **TARGET** | **RP** | **TARGET** | **RP** | **TARGET** | **RP** | **TARGET** | **RP** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 10 |  |  |  | PenyediaanBarangCetakan danPenggandaan | Jumlah LaporanPenyediaanBarang Cetakandan Penggandaansesuairencanakebutuhan | 12 | 35,000,000 | 12 | 38,500,000 | 12 | 42,350,000 | 12 | 46,585,000 | Sub BagianUmumdanKepegawaian | Kec.Ulaweng |
| 11 |  | PenyediaanBahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan | Jumlah LaporanPenyedian BahanBacaan danPeraturanPerundang-Undangan | 12 | 23,400,000 | 12 | 25,740,000 | 12 | 28,314,000 | 12 | 31,145,400 | Sub BagianUmumdanKepegawaian | Kec.Ulaweng |
| 12 |  | Penyelenggaraan RapatKoordinasidanKonsultasiSKPD | Jumlah KegiatanRutin Koordinasidan KonsultasiPelaksanaanTupoksi Organisasiyangdiikuti(kegiatan) | 750 | 247,400,000 | 825 | 272,140,000 | 908 | 299,354,000 | 999 | 329,289,400 | Sub BagianUmumdanKepegawaian | Kec.Ulaweng |
|  |  | **AdministrasiKeuanganPerangkatDaerah** | **PersentasePelaksanaanAdministrasiKeuangan** | **100%** | **16,053,476,999** | **100%** | **17,658,824,699** | **100%** | **19,424,707,169** | **100%** | **21,367,177,886** |  | **Kec.Ulaweng** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  |  |  | PenyedianGajidanTunjanganASN | Jumlah LaporanRealisasiPembayaran Gajidan Tunjanganbeserta TambahanPenghasilan BagiASN | 12 | 16,053,476,999 | 12 | 17,658,824,699 | 12 | 19,424,707,169 | 12 | 21,367,177,886 | Sub BagianProgram danKeuangan | Kec.Ulaweng |
| 14 |  |  |  | PelaksanaanPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeunganSKPD | JumlahPelaksanaanPenatausahaandanPengkajian/VerifikasiKeunganSKPD | 12 | 7,560,000 | 12 | 8,400,000 | 12 | 9,240,000 | 12 | 10,164,000 | Sub BagianUmumdanKepegawaian | Kec.Ulaweng |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **KODE** | **PROGRAMPRIORITAS** | **INDIKATORKINERJA(OUTCOME)** | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **2024** | | **UNIT KERJAPENANGGUNGJAWAB** | **LOKASI** |
| **TARGET** | **RP** | **TARGET** | **RP** | **TARGET** | **RP** | **TARGET** | **RP** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  |  | **PengadaanBarang MilikDaerahPenunjangUrusanPemerintahanDaerah** | **PersentasePengadaanBarang MilikDaerah** | **100%** | **141,192,000** | **100%** | **155,311,200** | **100%** | **170,842,320** | **100%** | **187,926,552** |  | **Kec.Ulaweng** |
| 15 |  | PengadaanMebel | JumlahPengadaan Mebel(unit) | 10 | 71,242,000 | 10 | 78,366,200 | 10 | 86,202,820 | 10 | 94,823,102 | SeksiPelayananUmum | Kec.Ulaweng |
| 16 |  | PengadaanPeralatan danMesinLainnya | JumlahPengadaanPeralatan danMesin Lainnya(unit) | 10 | 49,617,108 | 10 | 54,578,819 | 10 | 60,036,701 | 10 | 66,040,371 | SeksiPelayananUmum | Kec.Ulaweng |
|  |  | **PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah** | **PeresentasePenyediaan JasaPenunjang** | **100%** | **500,156,000** | **100%** | **541,402,250** | **100%** | **595,542,475** | **100%** | **655,096,723** |  | **Kec.Ulaweng** |
| 17 |  | PenyediaanJasaKomunikasi,sumber dayaAirdanListrik | Jumlah RekeningListrik, Telpon/WifidanAir(rekening) | 36 | 68,660,000 | 36 | 69,225,450 | 36 | 76,147,995 | 36 | 83,762,795 | Sub BagianProgram danKeuangan | Kec.Ulaweng |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **KODE** | **PROGRAMPRIORITAS** | **INDIKATORKINERJA(OUTCOME)** | **2021** |  | **2022** |  | **2023** |  | **2024** |  | **UNIT KERJAPENANGGUNGJAWAB** | **LOKASI** |
| **TARGET** | **RP** | **TARGET** | **RP** | **TARGET** | **RP** | **TARGET** | **RP** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 18 |  |  |  | PenyediaanjasaPelayananUmumKantor | Jumnlah LaporanPembayaran JasaPelayananUmum | 12 | 431,496,000 | 12 | 472,176,800 | 12 | 519,394,480 | 12 | 571,333,928 | Sub BagianProgram danKeuangan | Kec.Ulaweng |
|  |  | **PemeliharaanBarang MilikDaerahPenunjangUrusanPemerintahan Daerah** | **PersentasePengadaanBarang MilikDaerah** | **100%** | **157,179,050** | **100%** | **172,896,955** | **100%** | **190,186,651** | **100%** | **209,205,316** |  | **Kec.Ulaweng** |
| 19 |  | PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan,Pajak, danPerizinanKendaraanDinasOperasionalatauLapangan | JumlahPenyediaan JasaPemeliharaanBiayaPemeliharaanPajak danPerizinanKendaraan DinasOperasional atauLapangan(unit) | 18 | 105,592,000 | 18 | 119,318,960 | 18 | 134,830,425 | 18 | 152,358,380 | SeksiPelayananUmum | Kec.Ulaweng |
| 20 |  | Pemeliharaan/RehabilitasiGedungKantor danBangunanLainnya | JumlahPemeliharaanRehabilitasiGedung Kantordan BangunanLainnya(kegiatan) | 12 | 51,587,050 | 12 | 56,745,755 | 12 | 62,420,331 | 12 | 68,662,364 | SeksiPelayananUmum | Kec.Ulaweng |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **KODE** | **PROGRAMPRIORITAS** | **INDIKATORKINERJA(OUTCOME)** | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **2024** | | **UNIT KERJAPENANGGUNGJAWAB** | **LOKASI** |
| **TARGET** | **RP** | **TARGET** | **RP** | **TARGET** | **RP** | **TARGET** | **RP** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  |  | **PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANANPUBLIK** | **CakupanRealisasiPenyelenggaraanPemerintahandan PelayananPublik(%)** | **100%** | **30,999,900** | **100%** | **33,000,000** | **100%** | **36,300,000** | **100%** | **39,930,000** |  | **Kec.Ulaweng** |
|  |  | **KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan** | **PersentasePelaksanaanKegiatanKoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan diTingkatKecamatan** | **100%** | **30,999,900** | **100%** | **33,000,000** | **100%** | **36,300,000** | **100%** | **39,930,000** |  | **Kec.Ulaweng** |
| 21 |  | Koordinasi/SinergiPerencanaandanPelaksanaanKegiatanPemerintahandenganPerangkatDaerah danInstansiVertikalTerkait | Jumlah LaporanPelaksanaanKoordinasi danSinkronisasiPerencanaanPerangkatDaerah | 1 | 30,999,900 | 1 | 33,000,000 | 1 | **36,300,000** | 1 | **39,930,000** | SeksiPembangunan,PemberdayanMasyarakatdanDesa | Kec.Ulaweng |
|  |  | **PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN** | **CakupanKegiatanPemberdayaanMasyarakat Desadan Kelurahan(%)** | **100%** | **2,978,835,210** | **100%** | **3,276,718,731** | **100%** | **3,604,390,604** | **100%** | **3,964,829,665** |  | **Kec.Ulaweng** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **KODE** | **PROGRAMPRIORITAS** | **INDIKATORKINERJA(OUTCOME)** | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **2024** | | **UNIT KERJAPENANGGUNGJAWAB** | **LOKASI** |
| **TARGET** | **RP** | **TARGET** | **RP** | **TARGET** | **RP** | **TARGET** | **RP** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  |  | **KoordinasiKegiatanPemberdayaan Desa** | **PersentasePelaksanaanKegiatanKoordinasiPemberdayaanDesa** | **100%** | **19,503,950** | **100%** | **21,454,345** | **100%** | **23,599,780** | **100%** | **25,959,757** |  | **Kec.Ulaweng** |
| 22 |  | PeningkatanEfektifitasKegiatanPemberdayaan Masyarakatdi wilayahKecamatan | Jumlah DokumenEvaluasiPelaksanaanFKKSdanTKSK  (dokumen) | 2 | **19,503,950** | 2 | **21,454,345** | 2 | **23,599,780** | 2 | **25,959,757** | SeksiPerekonomianPADdanKesra, SeksiPembangunan,Pemberdayaan MasyarakatdanDesa | Kec.Ulaweng |
|  |  | **KegiatanPemberdayaanKelurahan** | **PersentasePelaksanaanKegiatanPemberdayaanKelurahan** | **100%** | **2,959,331,260** | **100%** | **3,255,264,386** | **100%** | **3,580,790,825** | **100%** | **3,938,869,907** |  | **Kec.Ulaweng** |
| 23 |  | PembangunanSarana danPrasaranaKelurahan | JumlahPembangunanSarana danPrasaranaKelurahan(paket) | 8 | 2,189,563,710 | 8 | 2,408,520,081 | 8 | 2,649,372,089 | 8 | 2,914,309,298 | SeksiPemerintahandanKependudukan, SeksiPembangunan,Pemberdayaan MasyarakatdanDesa | Kec.Ulaweng |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUJUAN** | | | | | **SASARAN** | **KODE** | **PROGRAMPRIORITAS** | **INDIKATORKINERJA(OUTCOME)** | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **2024** | | **UNITKERJAPENANGGUNGJAWAB** | **LOKASI** |
| **TARGET** | **RP** | **TARGET** | **RP** | **TARGET** | **RP** | **TARGET** | **RP** |
| **1** | **2** | | | | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  | PemberdayaanMasyarakat diKelurahan | Jumlah KegiatanPelayananKesehatanMasyarakat,PelayananPerilaku HidupBersihdanSehatKelurahan(dokumen) | 4 | 769,767,550 | 4 | 842,318,200 | 4 | 926,550,020 | 4 | 1,019,205,022 | SeksiPerekonomianPAD danKesra,SeksiPembangunan,PemberdayaanMasyarakat danDesa | Kec. Ulaweng |
|  | | | | |
|  |  | **PROGRAMKOORDINASIKETENTRAMANDANKETERTIBANUMUM** | **PersentasePeningkatanSistemPengawasanInternalKecamatan(%)** | **100%** | **99,000,000** | **100%** | **108,900,000** | **100%** | **119,790,000** | **100%** | **131,769,000** |  | **Kec. Ulaweng** |
| 25 |  | Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetentraman danKetertibanUmum | PersentasePeningkatanSistemPengawasanInternalKecamataan | **100%** | **99,000,000** | **100%** | **108,900,000** | **100%** | **119,790,000** | **100%** | **131,769,000** |  | **Kec. Ulaweng** |
| 25 |  | | | | |  |  | Sinergitas denganKepolisian NegaraRepublikIndonesia, TentaraNasional IndonesiadanInstansiVertikal di WilayahKecamatan | JumlahOperasionalTripika(kali) | 36 | 99,000,000 | 36 | 108,900,000 | 36 | 119,790,000 | 36 | 131,769,000 | SeksiTrantibum | Kec. Ulaweng |

Tabel6.2

CapaianRencanaProgram,KegiatandanPendanaan tahun2019-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **KODE** | **PROGRAMPRIORITAS** | **INDIKATOR KINERJA(OUTCOME)** | **BASELINE** | **2020** | | **UNIT KERJAPENANGGUNGJAWAB** | **LOKASI** |
| **2019** | **TARGET** | **RP** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | **MeningkatkanAkuntabilitas KinerjaKecamatan TaneteRiattang Barat** | **MeningkatnyaKualitas PelayananPublik** |  | **PROGRAMPENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA** | **Cakupan Realisasi PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah(%)** | **100%** | **100%** | **16,406,437,439** |  |  |
|  |  | **Perencanaan,Penganggaran, danEvaluasi KinerjaPerangkatDaerah** | **PersentasePelaporanCapaianKinerja yang tersusun dandilaporkan sesuai kewajibanPerangkat Daerah** | **100%** | **100%** | **43,124,900** |  |  |
| 1 |  | Penyusunan DokumenPerencanaanPerangkatDaerah | JumlahDokumenPerencanaanKinerja Perangkat Daerah(dokumen) | 2 | 2 | 32,800,000 | Sub BagianProgram danKeuangan | Kec.Ulaweng |
| 2 |  | KoordinasidanPenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen PerencanaandanPenganggaran ProgramdanKegiatanPerangkatDaerahyangtersusun(dokumen) | 2 | 2 | 2,700,000 | Sub BagianProgram danKeuangan | Kec.Ulaweng |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **KODE** | **PROGRAMPRIORITAS** | **INDIKATOR KINERJA(OUTCOME)** | **BASELINE** | **2020** | | **UNIT KERJAPENANGGUNGJAWAB** | **LOKASI** |
| **2019** | **TARGET** | **RP** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 3 |  |  |  | KoordinasidanPeanyusunanDokumenPerubahanRKA-SKPD | Jumlah Koordinasi danPenyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD(dokumen) | 2 | 2 | 2,574,900 | Sub BagianProgram danKeuangan | Kec.Ulaweng |
| 4 |  | KoordinasidanPenyusunanLaporan Capaian KinerjadanIkhtisarRealisasiKinerjaSKPD | JumlahLaporanCapaianKinerjadanIkhtisar Realisasi KinerjaSKPDyangtersusun(dokumen) | 3 | 3 | 3,250,000 | Sub BagianProgram danKeuangan | Kec.Ulaweng |
| 5 |  | EvaluasiKinerjaPerangkatDaerah | Jumlah Dokumen EvaluasiKinerjaPerangkatDaerahyangtersusun(dokumen) | 4 | 4 | **1,800,000** | Sub BagianProgram danKeuangan | Kec.Ulaweng |
|  |  | **AdministrasiKepegawaian PerangkatDaerah** | **Persentase PelaksanaanAdministrasiKepegawaian** | **100%** | **100%** | **6,000,000** |  | **Kec.Ulaweng** |
| 6 |  | PengadaanPakaianDinasbeserta AtributKelengkapannya | Jumlah Pengadaan PakaianKhususHari-hari tertentu(stell) | 40 | 40 | 6,000,000 | Seksi PelayananUmum | Kec.Ulaweng |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **KODE** | **PROGRAMPRIORITAS** | **INDIKATOR KINERJA(OUTCOME)** | **BASELINE** | **2020** | | **UNIT KERJAPENANGGUNGJAWAB** | **LOKASI** |
| **2019** | **TARGET** | **RP** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  |  |  | **Administrasi UmumPerangkatDaerah** | **Persentase PelaksanaanAdminintrasiUmum** | **100%** | **100%** | **424,614,000** |  | **Kec.Ulaweng** |
| 7 |  | PenyediaanPeralatandanPerlengkapanKantor | JumlahLaporanPenyediaanPeralatan dan PerlengkapanPenunjangAdministrasiPerkantoran sesuai rencanakebutuhan | 12 | 12 | 51,308,800 | SubBagianUmumdanKepegawaian | Kec.Ulaweng |
| 8 |  | Penyediaan Bahan LogistikKantor | JumlahLaporanPenyediaanMakanan dan Minuman bagiPegawai dan Tamu sesuairencanakebutuhan | 12 | 12 | 122,010,000 | SubBagianUmumdanKepegawaian | Kec.Ulaweng |
| 9 |  | PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan | Jumlah Laporan PenyediaanBarang Cetakan danPenggandaansesuairencanakebutuhan | 12 | 12 | 34,895,200 | SubBagianUmumdanKepegawaian | Kec.Ulaweng |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **KODE** | **PROGRAMPRIORITAS** | **INDIKATOR KINERJA(OUTCOME)** | **BASELINE** | **2020** | | **UNIT KERJAPENANGGUNGJAWAB** | **LOKASI** |
| **2019** | **TARGET** | **RP** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 10 |  |  |  | PenyediaanBahanBacaandan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah LaporanPenyedianBahanBacaandanPeraturanPerundang-Undangan | 12 | 12 | 21,500,000 | SubBagianUmumdanKepegawaian | Kec.Ulaweng |
| 11 |  | Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD | Jumlah Kegiatan RutinKoordinasi dan KonsultasiPelaksanaanTupoksiOrganisasiyangdiikuti(kegiatan) | 240 | 750 | 194,900,000 | SubBagianUmumdanKepegawaian | Kec.Ulaweng |
|  |  | **Administrasi KeuanganPerangkatDaerah** | **PersentasePelaksanaanAdministrasiKeuangan** | **100%** | **100%** | **14,683,208,928** |  | **Kec.Ulaweng** |
| 12 |  | PenyedianGajidanTunjanganASN | Jumlah Laporan RealisasiPembayaran Gaji danTunjangan beserta TambahanPenghasilanBagiASN | 12 | 12 | 14,683,208,928 | Sub BagianProgram danKeuangan | Kec.Ulaweng |
|  |  | **PengadaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusanPemerintahanDaerah** | **Persentase PengadaanBarangMilikDaerah** | **100%** | **100%** | **91,500,000** |  | **Kec.Ulaweng** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **KODE** | **PROGRAMPRIORITAS** | **INDIKATOR KINERJA(OUTCOME)** | **BASELINE** | **2020** | | **UNIT KERJAPENANGGUNGJAWAB** | **LOKASI** |
| **2019** | **TARGET** | **RP** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 13 |  |  |  | PengadaanMebel | JumlahPengadaanMebel(unit) | 10 | 10 | 46,550,000 | Seksi PelayananUmum | Kec.Ulaweng |
| 14 |  | PengadaanPeralatandanMesinLainnya | JumlahPengadaanPeralatandanMesinLainnya(unit) | 10 | 10 | 44,950,000 | Seksi PelayananUmum | Kec.Ulaweng |
|  |  | **Penyediaan JasaPenunjang UrusanPemerintahanDaerah** | **PeresentasePenyediaanJasaPenunjang** | **100%** | **100%** | **926,793,660** |  | **Kec.Ulaweng** |
| 15 |  | Penyediaan JasaKomunikasi,sumberdayaAir danListrik | Jumlah Rekening Listrik,Telpon/WifidanAir(rekening) | 36 | 36 | 13,893,660 | Sub BagianProgram danKeuangan | Kec.Ulaweng |
| 16 |  | PenyediaanjasaPelayananUmum | JumnlahLaporanPembayaranJasaPelayananUmum | 12 | 12 | 912,900,000 | Sub BagianProgram danKeuangan | Kec.Ulaweng |
|  |  | **PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusan PemerintahanDaerah** | **Persentase PengadaanBarangMilikDaerah** | **100%** | **100%** | **231,195,951** |  | **Kec.Ulaweng** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **KODE** | **PROGRAMPRIORITAS** | **INDIKATOR KINERJA(OUTCOME)** | **BASELINE** | **2020** | | **UNIT KERJAPENANGGUNGJAWAB** | **LOKASI** |
| **2019** | **TARGET** | **RP** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 17 |  |  |  | Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasionalatauLapangan | Jumlah Penyediaan JasaPemeliharaan BiayaPemeliharaan Pajak danPerizinan Kendaraan DinasOperasionalatauLapangan(unit) | 18 | 18 | 186,195,951 | Seksi PelayananUmum | Kec.Ulaweng |
| 18 |  | Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunanLainnya | Jumlah PemeliharaanRehabilitasiGedungKantordanBangunanLainnya(kegiatan) | 12 | 12 | 45,000,000 | Seksi PelayananUmum | Kec.Ulaweng |
|  |  | **PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANANPUBLIK** | **Cakupan RealisasiPenyelenggaraanPemerintahandanPelayananPublik(%)** | **100%** | **100%** | **11,450,000** |  | **Kec.Ulaweng** |
|  |  | **KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahandiTingkat Kecamatan** | **Persentase PelaksanaanKegiatan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan** | **100%** | **100%** | **11,450,000** |  | **Kec.Ulaweng** |
| 19 |  | Koordinasi/SinergiPerencanaandanPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansiVertikalTerkait | Jumlah Laporan PelaksanaanKoordinasi dan SinkronisasiPerencanaanPerangkatDaerah | 1 | 1 | 11,450,000 | SeksiPembangunan,PemberdayanMasyarakat danDesa | Kec.Ulaweng |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **KODE** | **PROGRAMPRIORITAS** | **INDIKATOR KINERJA(OUTCOME)** | **BASELINE** | **2020** | | **UNIT KERJAPENANGGUNGJAWAB** | **LOKASI** |
| **2019** | **TARGET** | **RP** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 20 |  |  |  | **PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKATDESADANKELURAHAN** | **Cakupan KegiatanPemberdayaan MasyarakatDesadanKelurahan (%)** | **100%** | **100%** | **2,705,667,000** |  | **Kec.Ulaweng** |
|  |  | **KoordinasiKegiatanPemberdayaanDesa** | **PersentasePelaksanaanKegiatan KoordinasiPemberdayaanDesa** | **100%** | **100%** | **18,000,000** |  | **Kec.Ulaweng** |
| 21 |  | Peningkatan EfektifitasKegiatanPemberdayaanMasyarakat di wilayahKecamatan | Jumlah Dokumen EvaluasiPelaksanaanFKKSdanTKSK(dokumen) | 2 | 2 | 18,000,000 | SeksiPerekonomianPADdanKesra,SeksiPembangunan,PemberdayaanMasyarakat danDesa | Kec.Ulaweng |
|  |  | **KegiatanPemberdayaanKelurahan** | **Persentase PelaksanaanKegiatan PemberdayaanKelurahan** | **100%** | **100%** | **2,687,667,000** |  | **Kec.Ulaweng** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **KODE** | **PROGRAMPRIORITAS** | **INDIKATOR KINERJA(OUTCOME)** | **BASELINE** | **2020** | | **UNIT KERJAPENANGGUNGJAWAB** | **LOKASI** |
| **2019** | **TARGET** | **RP** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 22 |  |  |  | PembangunanSaranadanPrasaranaKelurahan | JumlahPembangunanSaranadan Prasarana Kelurahan(paket) | 8 | 8 | 1,937,667,000 | SeksiPemerintahan danKependudukan,SeksiPembangunan,PemberdayaanMasyarakat danDesa | Kec.Ulaweng |
| 23 |  | PemberdayaanMasyarakatdiKelurahan | Jumlah Kegiatan PelayananKesehatanMasyarakat,PelayananPerilakuHidupBersihdanSehatKelurahan(dokumen) | 4 | 4 | 750,000,000 | SeksiPerekonomianPADdanKesra,SeksiPembangunan,PemberdayaanMasyarakat danDesa | Kec.Ulaweng |
|  |  | **PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBANUMUM** | **Persentase PeningkatanSistemPengawasanInternalKecamatan (%)** | **100%** | **100%** | **77,000,000** |  | **Kec.Ulaweng** |
| 25 |  | SinergitasdenganKepolisian Negara RepublikIndonesia,TentaraNasionalIndonesiadanInstansiVertikal di WilayahKecamatan | JumlahOperasionalTripika(kali) | 36 | 36 | 77,000,000 | SeksiTrantibum | Kec.Ulaweng |

# BAB VII

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka disajikan Hasil Reviu yang dilaksanakan sebagaimana 2 tabel perbandingan sebelum dan setalah reviu sebagai berikut:

Tabel7.1

Indikator kinerja Kantor Camat Ulaweng Sebelum Reviu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Indikator** | **KondisiKinerjapada awal periodeRPJMD** | **Target Capaian SetiapTahun** | | | | | **KondisiKinerjapada akhir periodeRPJMD** |
| **Tahun2018** | **Tahun2019** | **Tahun2020** | **Tahun2021** | **Tahun2022** | **Tahun2023** |
| **1** | Persentase pelayanan kepada  masyarakat yang dilaksanakan  sesuai standar pelayanan | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| **2** | Persentase pengaduan pelayanan  publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| **3** | Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat  hasil musrembang kelurahan/desa dapat dilaksankan ditingkat  kelurahan/desa | 35 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 50 |
| **4** | Persentase gangguan keamanan,ketentraman dan ketertiban  masyarakat yang dapat diselesaikan | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 |
| **5** | Persentase penurunan pelanggaran  Terhadap Perda | 85 | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 100 |

Tabel 7.1

Indikator kinerja Kantor Camat Ulaweng Setelah Reviu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Indikator** | **Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD** | **Target Capaian SetiapTahun** | | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Hasil Evaluasi  Sakipoleh Apip | B | BB | BB | A | A |
| 2 | Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuaiStandar  Pelayanan | 90 | 92 | 100 | 100 | 100 |

# BAB VIII

**PENUTUP**

Sejalan dengan kedudukan,tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Ulaweng merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Bone. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ulaweng merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan Pembangunan diPemerintah Kabupaten Bone.Perubahan Renstra Kecamatan Ulaweng akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah danadanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakatdan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya padaproses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya,yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggidaritiga komponen yang ada.

* 1. PedomanTransisi

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ulaweng Tahun 2021-2023 adalah selamati tahun.Untu kmenjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Perubahan Renstra Tahun 2021-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunanRenja Perangkat Daerah.

* 1. KaidahPelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra)Kecamatan Tanete Riattang Barat Tahun 2021-2023 yang perlu diatur sebagaiberikut:

* + 1. Sekretariat dan seksi-seksi agar mendukung pencapaian target-target Rancangan Akhir Perubahan Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Rancangan Akhir Perubahan Renstra dengansebaik-baiknya.
    2. Diharapkanseluruh aparatur diSekretariat dan seksi-seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Perubahan Renstra ini dapat tercapai.
    3. Rancangan Akhir Perubahan Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja(Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjagakonsistensi dan keselarasan kebijakan.Programdan kegiatan, maka Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra.
    4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaiantarget-target Rancangan Akhir Perubahan Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan,pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secaraberkala.
    5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan ditingkat nasionaldan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kaidah danketentuanperundang-undangan yang berlaku.

Demikian,semoga PerubahanR encana Strategis Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone sampai dengan tahun 2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.Dalam penyusunan Perubahan Renstra ini di mohon masukan dan saran yang membangunatas kekurangan dan ketidak sempurnaan dokumen Perubahan Renstra KecamatanUlaweng Tahun 2021 2023 Kabupaten Bone.